

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang paling sering di alami oleh negara berkembang yaitu sesuatu yang berhubungan erat dengan masalah ketenagakerjaan, dimana Indonesia termasuk ke dalam negara dengan pertumbuhan jumlah populasi yang cukup cepat yang artinya mempunyai input tenaga kerja yang cukup besar dan tentunya dapat memunculkan berbagai masalah ditandai dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang sangat pesat. Berdasarkan data jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 140,15 juta/jiwa pada tahun 2021, jumlah tersebut meningkat sebesar 1,95 juta/jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Bertambahnya angkatan kerja menggambarkan bahwa penawaran tenaga kerja juga meningkat, namun tidak setiap kenaikan angkatan kerja selalu dibarengi dengan meningkatnya jumlah permintaan akan tenaga kerja yang dapat diserap.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang mencakup 34 provinsi di lima pulau besar yang ada seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Selanjutnya jika dilihat dari tingkat PDB terlihat bahwa struktur spasial perekonomian Indonesia pada tahun 2021 masih terpusat di Pulau Jawa, hal ini tercermin dari kontribusi PDRB di Pulau Jawa sebesar 57,89 persen di susul Pulau Sumatera menempati posisi berikutnya dengan kontribusi sebesar 21,7 persen terhadap ekonomi Indonesia, disusul kontribusi PDRB dari Pulau Kalimantan, Sulawesi masing-masing sebesar 8,25 persen dan 6,89 persen, serta Pulau Papua yang menyumbang sebesar 2,49 persen.

Tabel 1.1 Penduduk bekerja di 5 pulau besar di Indonesia tahun 2021 (juta/jiwa)

Nama Pulau	Penduduk Bekerja Tahun 2021
Pulau Jawa	73.841.847
Pulau Sumatera	28.296.161
Pulau Sulawesi	9.435.329
Pulau Kalimantan	8.080.298
Pulau Papua	3.518.898

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total jumlah penduduk yang sudah bekerja di Pulau Jawa tahun 2021 sebesar 73 juta/jiwa, sedangkan jumlah penduduk bekerja di Pulau Sumatera mencapai 28 juta/jiwa (Badan Pusat Statistik, 2022).

Terlihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari jumlah penduduk bekerja di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sedangkan jika dilihat, Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar kedua dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa melimpah, namun mengapa tingkat penduduk bekerjanya jauh lebih rendah, kondisi ini tentu saja menjadi masalah yang perlu diselesaikan mengingat Pulau Sumatera sebagai penyumbang PDB terbesar kedua setelah Pulau Jawa. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat data perkembangan angkatan kerja di 10 provinsi di Pulau Sumatera

Tabel 1.2 Data angkatan kerja di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021 (juta/jiwa)

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	2.330.206	2.397.089	2.499.701	2.549.026	2.548.929
Sumatera Utara	6.716.499	7.545.035	7.801.371	7.656.538	7.479.112
Sumatera Barat	2.617.874	2.823.663	2.772.122	2.900.087	2.768.674
Riau	3.128.108	3.267.243	3.253.641	3.267.597	3.287.822
Jambi	1.792.278	1.850.221	1.784.310	1.806.426	1.832.452
Sumatera Selatan	4.244.369	4.422.481	4.391.094	4.378.187	4.444.990
Bengkulu	1.033.581	1.059.605	1.061.950	1.101.022	1.083.744
Lampung	4.271.193	4.507.882	4.524.353	4.553.236	4.619.666
Bangka-Belitung	728.489	750.443	727.626	759.294	756.874
Kepulauan Riau	1.053.415	1.116.783	1.102.249	1.129.501	1.153.878
Total Angkatan Kerja	27.916.012	29.740.445	29.918.417	30.100.914	29.976.141

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Indonesia 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa total angkatan kerja yang ada di Pulau Sumatera dari tahun 2017 - 2021 mengalami peningkatan sepanjang tahun dari 27 juta/jiwa meningkat menjadi 29 juta/jiwa, terlihat pada tahun 2021 jumlah angkatan kerja tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara sebesar 7,4 juta/jiwa dan urutan kedua berada di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk sebesar 4,6 juta/jiwa dan urutan ketiga berada di Provinsi Sumatera Selatan dengan populasi sebesar 4,4 juta/jiwa, sementara terlihat provinsi dengan populasi penduduk paling

sedikit berada di Provinsi Bangka Belitung dengan jumlah penduduk sebesar 756 ribu/jiwa.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara adalah besarnya angka kelahiran di provinsi tersebut serta besarnya angka migrasi yang dilakukan masyarakat ke wilayah tersebut mengingat Sumatera Utara adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Jakarta, Surabaya dan Makasar, selain itu daya tarik hasil perkebunan dan perdagangannya yang menjadi pemicu masyarakat untuk memilih tinggal di provinsi ini.

Menurut teori Malthus yang menjelaskan bahwa semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan terciptanya angkatan kerja yang semakin banyak pula yang mana bila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah sehingga dapat menekan tingkat upah.

Tabel 1.3 Data penduduk bekerja di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021 (juta/jiwa)

Provinsi	Penduduk Bekerja				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	2.158.099	2.240.378	2.362.705	2.411.352	2.388.367
Sumatera Utara	6.286.296	7.122.114	7.267.029	7.295.545	7.029.733
Sumatera Barat	2.465.974	2.663.327	2.623.039	2.747.820	2.584.119
Riau	2.947.871	3.085.817	3.079.405	3.106.731	3.124.739
Jambi	1.726.578	1.784.287	1.721.542	1.729.439	1.735.146
Sumatera Selatan	4.083.217	4.242.127	4.214.766	4.207.656	4.215.064
Bengkulu	1.004.559	1.031.744	1.036.317	1.067.126	1.043.415
Lampung	4.082.131	4.412.972	4.245.420	4.359.237	4.409.752
Bangka-Belitung	695.988	723.494	703.460	733.858	718.693
Kepulauan Riau	985.619	1.035.236	1.024.868	1.062.004	1.037.133
Total Penduduk Bekerja Pulau Sumatera	26.436.332	28.341.496	28.278.551	28.720.768	28.286.161

Sumber Data: Badan Pusat statistik Indonesia, 2022

Berdasarkan data di atas bisa dilihat bahwa rata rata penduduk bekerja di Pulau Sumatera dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebesar 26,4 juta/jiwa kemudian terlihat bahwa jumlah penduduk bekerja pada tahun 2020 meningkat menjadi 28,7 juta/jiwa kemudian turun di tahun 2021 menjadi 28,2 juta/jiwa. Terlihat bahwa provinsi dengan jumlah penduduk

bekerja paling sedikit berada di Provinsi Bangka Belitung dan provinsi dengan jumlah penduduk bekerja paling tinggi berada di Provinsi Sumatera Utara, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera masih terbilang rendah.

Tabel 1.4 Data penduduk menganggur di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021 (ribu/jiwa)

Provinsi	Penduduk Menganggur				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	172.107	156.711	136.996	137.674	160.562
Sumatera Utara	430.203	422.921	434.342	360.993	449.379
Sumatera Barat	151.900	160.336	149.083	152.267	184.555
Riau	180.237	181.426	174.236	160.866	163.083
Jambi	65.700	65.934	62.768	76.987	87.306
Sumatera Selatan	161.152	180.354	176.328	170.531	229.926
Bengkulu	29.022	27.861	25.633	33.896	40.329
Lampung	189.062	194.910	178.933	193.999	209.914
Bangka-Belitung	32.501	26.949	24.166	25.436	38.181
Kepulauan Riau	67.796	81.547	77.381	67.497	116.745
Total Penduduk Menganggur Pulau Sumatera	1.479.680	1.498.949	1.439.866	1.380.146	1.679.980

Sumber Data: Badan Pusat statistik Indonesia,2022

Terlihat bahwa data pengangguran di Pulau Sumatera meningkat dari 1,4 juta/jiwa pada 2017 meningkat menjadi 1,6 juta/jiwa pada tahun 2021. Terlihat pada tahun 2021 provinsi dengan tingkat pengangguran paling tinggi berada di Sumatera Utara sebesar 449 ribu/jiwa, sementara itu, provinsi dengan tingkat pengangguran paling kecil pada tahun 2021 berada di Bangka Belitung sebesar 38 ribu/jiwa.

Jika dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja di Pulau Sumatera mulai dari 2017 sampai 2021 terlihat mengalami penurunan setiap tahunnya. Dimana TPAK pada tahun 2017 sebesar 70,66 persen kemudian turun di tahun 2021 sebesar 68,39 persen, walaupun tidak begitu signifikan namun tetap berlanjut. Sedangkan jika dilihat pada triwulan IV tahun 2018, pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Sumatera tumbuh sebesar 4,46 persen, pertumbuhan tertinggi berada di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 6,07 persen kemudian terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera tahun 2019 tumbuh sebesar 21,32 persen meskipun

mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan, namun dapat mengindikasikan adanya sebuah peningkatan perekonomian (Badan Pusat Statistik,2022).

Selain itu EPR (Employment to Population Ratio) juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dimana EPR adalah rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja atau angkatan kerja. Rasio yang tinggi menunjukkan kondisi sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah menunjukkan sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar tenaga kerja, karena mereka menganggur atau mungkin tidak termasuk dalam angkatan kerja (Badan Pusat statistik,2020)

Tabel 1.5 Data Employment to Population Ratio (EPR) di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021 (juta/jiwa)

Provinsi	Employment to Population Ratio EPR (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	92,61	93,46	94,52	94,6	93,7
Sumatera Utara	93,59	94,39	94,43	95,29	93,99
Sumatera Barat	94,2	94,32	94,62	94,75	93,33
Riau	94,24	94,45	94,64	95,08	95,04
Jambi	96,33	96,44	96,48	95,74	95,24
Sumatera Selatan	96,2	95,92	95,98	96,1	94,83
Bengkulu	97,19	97,37	97,59	96,92	96,28
Lampung	95,57	95,68	96,05	95,74	95,46
Bangka-Belitung	95,54	96,41	96,68	96,65	94,96
Kepulauan Riau	93,56	92,7	92,98	94,02	89,88
Rata rata Pulau Sumatera	94,90	95,11	95,40	95,49	94,27

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi EPR secara umum mengalami peningkatan yang berbeda beda dari tahun 2017 – 2021, dimana dapat dilihat dari tahun 2017-2021 EPR paling tinggi berada di Provinsi Bengkulu di susul Provinsi Jambi. Kemudian jika dilihat secara rata rata dari tahun 2017-2021 EPR paling tinggi berada di tahun 2020 sebesar 95,49 persen dan kondisi EPR paling rendah berada di tahun 2021 sebesar 94,27 persen. Salah satu penyebab rendahnya EPR pada tahun 2021 adalah dampak dari pandemi yang baru terasa sekali pengaruhnya di tahun 2021 dimana kondisi ekonomi yang terpuruk menyebabkan banyak

masyarakat yang di PHK serta banyak perusahaan yang memutuskan untuk menutup usahanya sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya penyerapan tenaga kerja.

Selain itu dapat dilihat bahwa fokus pengembangan ekonomi di Pulau Sumatera bersumber dari pusat pembuatan dan produksi hasil pertanian serta cadangan energi nasional, dimana 70 persen merupakan penghasil kelapa sawit, 65 persen penghasil komoditi karet, serta 52,4 miliar ton batubara berada di wilayah ini, dan 8 persen merupakan penghasil utama biji besi nasional (Badan Pusat Statistik, 2022).

Tidak hanya itu pulau ini memiliki beranekaragam tempat wisata yang menarik yang menjadi daya tarik wilayah ini, yang mana pulau ini menjadi pulau terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 443.065,8 km² dan menjadi pulau dengan pertumbuhan perekonomian tercepat ke 2 setelah Pulau Jawa dan diharapkan dapat meningkatkan investasi dalam negeri. Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah mengenai perkembangan investasi PMDN di 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

Tabel 1.6 Data investasi PMDN di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021 (miliar/rupiah)

Provinsi	investasi PMDN (Miliar rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	782,8	970	3.606,9	8.241,1	7.904,7
Sumatera Utara	11.683,6	8.371,8	19.749,0	18.189,5	18.484,5
Sumatera Barat	1.517	2.309,4	3.026,6	3.106,2	4.183,7
Riau	10.829,8	9.056,4	26.292,2	34.117,8	24.997,8
Jambi	3.006,6	2.876,5	4.437,4	3.511,7	6.204,2
Sumatera Selatan	8.200,2	9.519,8	16.921,1	15.824,5	16.266,9
Bengkulu	296,5	4.902,8	5.458,1	5.399,2	4.923,5
Lampung	7.014,8	12.314,7	2.428,9	7.120,5	10.513,2
Bangka Belitung	1.734,7	3.112,9	2.915,2	1.863,8	3.677,4
Kepulauan Riau	1.398	4.386,0	5.656,4	14.249,0	9.768,7
Total Investasi Pulau Sumatera	46.464,0	57.820,3	90.491,8	111.623,3	106.924,6

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa realisasi investasi Provinsi Riau berada di peringkat ke 5 secara nasional dan menempati urutan ke 1 di Pulau Sumatera dalam realisasi investasi nasional periode Januari–Desember 2021, secara keseluruhan realisasi investasi PMDN Provinsi Riau mencapai Rp.24,9 miliar di susul Provinsi Sumatera Utara dengan total investasi sebesar Rp.18,4 miliar dan Sumatera Selatan sebesar Rp.16,2 miliar serta Provinsi Lampung dengan nilai investasi sebesar Rp.10,5 miliar dan terlihat bahwa investasi terendah berada di Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp.3,6 miliar (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Terlihat bahwa total investasi PMDN di Pulau Sumatera pada tahun 2017 sebesar Rp.46,4 miliar meningkat menjadi Rp.106,9 miliar pada tahun 2021. Keadaan ini menggambarkan bahwa peningkatan investasi dapat meningkatkan kesempatan kerja serta mempercepat penyerapan tenaga kerja dan berpotensi untuk menurunkan angka pengangguran.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kondisi ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja, penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi (Sukirno,2000)

Hal ini juga di dukung oleh teori Harrod-Domard yang menyimpulkan bahwa investasi memiliki pengaruh ganda untuk jangka panjang (*long-term*). Pada satu sisi, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha, di sisi lain investasi berpengaruh pada permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik diperlukan kondisi di mana para pelaku usahanya memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil.

Selain itu dapat dilihat bahwa fokus pengembangan ekonomi di Pulau Sumatera bersumber dari pusat pembuatan dan produksi hasil pertanian serta

cadangan energi nasional, dimana 70 persen merupakan penghasil kelapa sawit, 65 persen merupakan penghasil komoditi karet, serta 52,4 milyar ton batubara berada di wilayah ini, dan 8 persen merupakan penghasil utama biji besi. Tidak hanya itu pulau ini juga memiliki beranekaragam tempat wisata yang menarik yang menjadi daya tarik wilayah ini, selain itu perkembangan perekonomian yang berjalan cepat di wilayah ini didorong dari kekayaan alamnya yang melimpah dan lokasi kawasan yang cukup strategis.

Tenaga kerja biasanya meningkat seiring dengan maju dan berkembangnya sektor ekonomi, dan hal ini biasanya diikuti dengan partisipasi angkatan kerja yang semakin meningkat, namun terlihat bahwa terjadi penurunan partisipasi angkatan kerja di saat kondisi perekonomian menunjukkan keadaan yang baik dan stabil. Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan mengapa kondisi seperti ini bisa terjadi. Sementara menurut Todaro (2006), peningkatan angkatan kerja dan peningkatan pertumbuhan penduduk secara konvensional di nyatakan sebagai salah satu indikator positif yang mempercepat pertumbuhan perekonomian. Jika dilihat pertumbuhan ekonomi itu sendiri, sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja ekonomi, terutama dalam mengkaji hasil pembangunan perekonomian di suatu negara atau wilayah tertentu. seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7 Data pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2021 (persen)

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	4,18	4,61	4,14	-0,37	2,79
Sumatera Utara	5,12	5,18	5,22	-1,07	2,61
Sumatera Barat	5,3	5,14	5,01	-1,61	3,29
Riau	2,66	2,35	2,81	-1,13	3,36
Jambi	4,6	4,69	4,35	-0,51	3,69
Sumatera Selatan	5,51	6,01	5,69	-0,11	3,58
Bengkulu	4,98	4,97	4,94	-0,02	3,27
Lampung	5,16	5,23	5,26	-1,66	2,77
Bangka Belitung	4,47	4,45	3,32	-2,29	5,05
Kepulauan Riau	1,98	4,47	4,83	-3,8	3,43
Rata rata Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera	4,40	4,71	4,56	-1,26	3,38

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Indonesia 2022

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera cenderung menunjukkan kondisi yang berfluktuasi di mana terlihat bahwa pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi paling tinggi berada di Provinsi Bangka Belitung sebesar 5,05 persen, di susul Provinsi Jambi sebesar 3,69 persen, Sumatera Selatan sebesar 3,58 persen, dan Kepulauan Riau sebesar 3,43 persen. Dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera paling tinggi berada di tahun 2018 sebesar 4,71 persen serta tahun 2019 sebesar 4,56 persen, sementara terlihat pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26 persen hal ini salah satu penyebabnya adalah pandemi covid yang terjadi dan cukup berpengaruh mengguncang perekonomian pada saat itu.

Kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara semakin meningkat menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut berkembang dengan baik, didukung dengan Hukum Okun yang menjabarkan hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap lapangan kerja bahwa bila pertumbuhan ekonomi di suatu daerah mengalami percepatan, maka lapangan kerja di daerah tersebut juga akan meningkat. Menurut hukum Okun ada korelasi negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, dimana kenaikan 1 persen pengangguran mengurangi pertumbuhan ekonomi minimal 2 persen dan begitupun sebaliknya, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya berpengaruh terhadap GDP dan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja secara positif.

Selain faktor faktor di atas inflasi juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dimana menurut teori Phillips yang menjelaskan bahwa pengaruh diantara pengangguran dan inflasi didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya peningkatan permintaan agregat. Menurut teori permintaan, ketika permintaan agregat meningkat maka harga akan naik, dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran akan berkurang karena permintaan akan tenaga kerja meningkat.

Berikut dapat dilihat bagaimana perkembangan inflasi di Pulau Sumatera sebagai berikut.

Tabel 1.8 Data inflasi di 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017 – 2021 (persen)

Provinsi	Inflasi (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	4,86	1,93	1,38	3,46	2,41
Sumatera Utara	3,18	1	2,43	1,76	1,7
Sumatera Barat	2,11	2,78	1,72	2,12	1,37
Riau	4,07	2,54	2,56	2,24	1,55
Jambi	2,68	3,02	1,27	3,09	1,67
Sumatera Selatan	2,85	2,78	2,06	1,5	1,84
Bengkulu	3,56	2,35	2,91	0,89	2,42
Lampung	3,14	2,92	3,53	1,93	2,13
Bangka-Belitung	2,66	3,45	2,31	0,52	3,6
Kepulauan Riau	3,37	2,36	2,4	1,66	0,86
Rata-rata inflasi Pulau Sumatera	3,25	2,51	2,26	1,92	1,96

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa inflasi di 10 provinsi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana inflasi tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada Provinsi Bangka Belitung sebesar 3,6 persen urutan kedua berada di Provinsi Bengkulu sebesar 2,42 persen dan Provinsi Aceh pada urutan ke tiga dengan tingkat inflasi sebesar 2,4 persen dan terlihat bahwa inflasi terendah berada pada Provinsi Kepulauan Riau dengan tingkat inflasi sebesar 0,86 persen.

Menurut Nanga (2005) inflasi yang terjadi pada perekonomian di suatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitasi inflasi yang terjadi. Apabila inflasi yang terjadi dalam perekonomian masih tergolong ringan, maka perusahaan berusaha untuk menambah jumlah output atau produksi karena inflasi yang ringan dapat mendorong semangat kerja produsen dari naiknya harga yang mana masih dapat dijangkau oleh produsen. Keinginan perusahaan untuk menambah output tentu juga dibarengi oleh penambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Pada kondisi tersebut permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya

meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan pada akhirnya mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional.

Melihat masalah penyerapan tenaga kerja yang masih rendah tentunya menjadi pertanyaan mengapa hal ini bisa terjadi, karena melihat Pulau Sumatera merupakan pulau yang kaya, di khawatirkan sedikitnya lapangan pekerjaan di Pulau Sumatera menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan migrasi ke wilayah yang di anggap memiliki potensi menyerap tenaga kerja jauh lebih besar contohnya saja seperti Pulau Jawa, semakin banyak masyarakat yang melakukan perpindahan ke daerah tersebut tentunya ini akan menyebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa yang nantinya akan menyebabkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengangguran, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial yang semakin jelas terlihat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya serta faktor faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, maka dari itu peneliti ingin menganalisis apa determinan yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan penyerapan tenaga kerja, EPR, investasi PMDN, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi di provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021?
2. Bagaimana pengaruh EPR, investasi PMDN, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penyerapan tenaga kerja, Employment to Population Ratio (EPR), investasi PMDN, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi di provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Employment to Population Ratio (EPR), investasi PMDN, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dilakukanya penelitian ini memiliki manfaat baik secara praktis dan teoritis di antaranya :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat di lakukanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai determinan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera

2. Manfaat Praktis

Manfaat di lakukanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu referensi dalam perumusan kebijakan menganalisis determinan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera.